

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KECAMATAN SUNGAI APIT
TAHUN 2011**

**Eko Purwanto
Eko_purwanto28@yahoo.com
DR. Khairul Anwar, M.Si**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstract

Siak District Government through the Department of Social Welfare and Labor began to run a program created by the central government to improve the social welfare of society. The purpose of the program with social welfare problems is to improve people's quality of life and social welfare to all the poor and not able to achieve an optimal degree of public life effectively and efficiently. One of the goals of this program is the Community or poor families.

Implementation Program with social welfare problems in Sungai Apit in 2011, it can be concluded that the poor implementation of the program problems had not been effective. This is due to the lack of qualified resources, will run effectively and efficiently if it is supported by a qualified staff and have qualified skills, good running information between the relevant parties can create management were also good, and the authority of the executing agency will be able to help Implementation of program implementation with social welfare problems in Sungai Apit

Key word: Implementatio, Program, Disability, Social Welfare Issues

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Indonesia jelas tidak sepenuhnya menganut negara kesejahteraan. Meskipun Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun letak tanggung jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Pusat merancang sebuah program yang dinamai program Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian program ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) mulai menjalankan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun tujuan dari program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini adalah meningkatkan kualitas hidup rakyat dan kesejahteraan sosial kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat hidup masyarakat yang

optimal secara efektif dan efisien. Salah satu sasaran dari program ini adalah Masyarakat atau keluarga miskin.

Dalam hal ini diharapkan nantinya program ini dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Siak. Namun berdasarkan observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa hingga pertengahan tahun 2011, Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) belum dilaksanakan, karena pemberdayaan yang diberikan masih difokuskan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang terdata sebagai fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi social yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah mengembangkan usaha bersama. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang, dan untuk Kecamatan Sungai Apit terdapat 2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdapat di Kelurahan Sungai Apit dan Desa ParitI/II. Usaha yang diberikan seperti ternak kerbau, menjahit, pembuatan kerupuk, dll. Untuk 2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdapat di Kecamatan Sungai Apit sendiri yakni ternak ikan yang

ada di Kelurahan Sungai Apit sejak Bulan Maret Tahun 2010 dan menjahit yang ada di Desa Parit I/II sejak pertengahan Tahun 2011.

Dari uraian di atas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu *“Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit Tahun 2011”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit. Alasan pemilihan lokasi ini adalah, karena di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak mempunyai Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penting untuk diselesaikan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Apit

PEMBAHASAN

Sebuah kebijakan tidaklah lahir begitu saja, dibutuhkan sebuah proses agar tercipta sebuah kebijakan yang memberikan manfaat positif pada persoalan-persoalan publik. Implementasi kebijakan program merupakan penerapan sebuah program untuk menyelesaikan suatu masalah yang dalam hal ini adalah masalah kemiskinan. Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat

dan kesejahteraan sosial kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat hidup masyarakat yang optimal. Salah satu sasaran dari program ini adalah keluarga miskin, sehingga diharapkan dengan adanya program ini dapat memperbaiki taraf hidup keluarga miskin. Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini dilakukan melalui kegiatan yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya.

Tujuan penting adalah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan kesejahteraan sosial kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat hidup masyarakat yang optimal. Untuk mengetahui implementasi program masalah fakir miskin dapat diketahui dari pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program PMKS di Kecamatan Sungai Apit Tahun 2011 diantaranya:

1.1.Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan

mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Oleh sebab itu faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan setiap unsur manusia dan sumberdaya akan selalu berusaha dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukannya.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi agar nantinya program Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat yang tergolong fakir miskin. Yang dimaksudkan disini adalah kelancaran, kejelasan, dan konsistensi menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi. Dalam pelaksanaannya program yang sudah disetujui perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kemudian didalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat harus melakukan komunikasi dengan baik kepada masyarakat yang terdata sebagai fakir miskin.

Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu sebagai berikut seperti: Transmisi, Kejelasan, Konsistensi;

1.1.1. Transmisi

Arus komunikasi yang terjadi harus tegas dan jelas. Bila tidak, maka akan terdapat kelonggaran bagi para pelaksana untuk menafsirkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perlu dihindari adanya suatu hal yang

dapat menimbulkan suatu kegaduhan, kebingungan diantara para pelaksana sebagai akibat dari adanya kelonggaran dalam menafsirkan kebijakan.

Pelaksanaan program masalah fakir miskin menuntut informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait di masyarakat. Untuk dapat mengetahui dan memperoleh penjelasan lebih detail mengenai program masalah fakir miskin. Para *policy maker* berharap ketepatan informasi yang disampaikan antara penyempai pesan dan penerima pesan ada kejelasan, supaya keputusan-keputusan dan perintah-perintah tertransmisi dengan sempurna kepada personil dilapangan sebagai pelaksana kebijakan, apa yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan.

1.1.2. Kejelasan

Hal ini penting, agar para implementor dapat mengetahui dengan jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai implementasi kebijakan/program dan juga mengetahui dengan jelas dan tegas mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan.

Berikut ini adalah beberapa hal yang diketahui sebagai faktor-faktor penghambat perikanan di kecamatan Sungai Apit.

1. Minimnya usaha diversifikasi produk (industri pengolahan) dan pemasaran khususnya di Kecamatan Sungai Apit.
2. Tingginya harga pakan ikan pabrik yang harus dibeli oleh para petani ikan di Kecamatan Sungai Apit.

3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan dan usaha budidaya perikanan di Kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari Kolam dan Kerambah dan saat ini petani ikan pada tahun 2012 hanya berjumlah 30 orang. Berikut ini adalah tabel luas Kolam dan Kerambah Di kecamatan Sungai Apit.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana serta yang saat ini masih menggunakan peralatan sederhana dan seadanya.
Implementasi kebijakan juga akan mendapatkan dukungan apabila gagasan, kebijakan, dan rencana kebijakan yang mencerminkan bahwa semua kebijakan itu bagi kepentingan masyarakat. Dapat diketahui dan kemudian di mengerti, dan selanjutnya diterima dengan penuh pengertian oleh masyarakat, karena hasil program yang dibuat dapat dinikmati oleh masyarakat. Kesemua dimaksudkan agar masyarakat lebih terbuka.

1.1.3. Konsistensi

Masyarakat yang sering melakukan komunikasi dengan pihak lain mempunyai probabilitas yang tinggi untuk tidak bersikap *seristent to change*. Masyarakat akan berubah persepsinya dan akan menganggap bahwa inovasi yang sedang berlangsung dapat dimengerti, dipahami, dan sesuai dengan orientasi serta nilainya. Ini berarti komunikasi dapat mengubah persepsi seorang atau masyarakat terhadap suatu inovasi, dan

karenanya akan mendukung implementasi kebijakan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kabupaten Siak, dan Dinas yang bersangkutan telah melakukan berbagai kegiatan mengenai penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi, namun masyarakat tidak termotivasi untuk ikut dalam acara tersebut dengan berbagai alasan. Sehingga pada tahapan persiapan ini untuk sub indikator penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi masih belum sempurna dalam penerapannya.

1.2. Faktor Sumber Daya Manusia

Kesadaran manusia akan pentingnya SDM bukan hal baru, manusia hidupnya selalu memikirkan cara memperoleh bahan pangan, sandang, dan papan. Peradaban manusia berpangkal pada usaha memperoleh dan memanfaatkan SDA yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Siapapun yang mengelola organisasi akan mengolah berbagai sumber daya untuk meraih tujuan organisasi tersebut. Sumber daya yang dimiliki oleh dapat dikategorikan atas enam tipe sumber daya (6M), yaitu sebagai berikut:

- Man (*Manusia*)
- Money (*Uang*)
- Material (*Fisik*)
- Maching (*Teknologi*)
- Method (*Metode*)
- Market (*Pasar*)

Dinas sosial dan tenaga kerja hanya mampu menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang seadanya dan

sangat terbatas. Tentunya dalam pelaksanaan program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dukungan berupa moril dan materil akan menumbuh kembangkan kreativitas dari para pelaksana itu sendiri, sehingga pelaksanaan program akan efektif.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya seperti sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Dalam sumberdaya diperlukan beberapa hal diantaranya:

1.2.1. Staff

Banyaknya staff tidak otomatis mendorong implementasi berjalan secara baik, hal mendasar yang perlu diketahui adalah kecakapan staff dalam bekerja yang perlu diperhatikan. Keterbatasan SDM juga akan menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan. Akan tetapi kualitas SDM yang baik dapat menentukan keberhasilan dari suatu program termasuk PMKS yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Berikut ini adalah jumlah anggota PMKS yang tergabung dalam KUBE di Kecamatan Sungai Apit.

Jumlah anggota PMKS yang tergabung dalam KUBE di Kecamatan Sungai Apit tahun 2011

No	KUBE	Jumlah
1.	Ternak Ikan	10 Orang
2.	Menjahit	10 Orang

Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kabupaten Siak tahun 2011

Kualitas sumber daya manusia sebagai modal dalam ekonomi dapat dijelaskan sebagai kemampuan atau kapasitas, baik dari pembawaan lahir dan keturunan maupun akumulasi yang dibentuk selama usia kerja yang disediakan untuk bekerja secara produktif dengan bentuk-bentuk modal yang lain untuk keberlanjutan ekonomi produksi. Istilah modal manusia pada umumnya didefinisikan dalam hal pendidikan, termasuk pengetahuan dan kemahiran pada usia kerja (guna tenaga) yang ter-akumulasi dari hasil pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman.

1.2.2. Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Jumlah Anggaran KUBE Kecamatan Sungai Apit

No	KUBE	Jumlah
1.	Ternak Ikan	Rp. 20.000.000
2.	Jahit	Rp. 20.000.000
3.	Pembuatan Kerupuk	Rp. 20.000.000
	Jumlah	Rp. 60.000.000

Sumber data: Laporan Keuangan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2011

1.2.3. Informasi

Para pelaksana perlu mengetahui kebijakan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Dengan demikian para pelaksana diberi petunjuk untuk melakukannya. *Kedua* data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Kelancaran informasi perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait dengan PMKS yang ada di kecamatan Sungai Apit. Pasalnya hal ini menjadi problem yang sulit diatasi oleh mereka, Dalam pelaksanaannya program PMKS perlu dilakukan sosialisasi sebagai salah satu wujud dari informasi oleh pemerintah kabupaten Siak dan kepada seruh pihak yang berkepentingan.

Salah satu sasaran dari Kebijakan ini adalah masyarakat atau keluarga fakir miskin dan diharapkan nantinya kebijakan ini dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di kecamatan Sungai Apit. Berikut ini adalah jumlah fakir miskin yang ada di Kecamatan Sungai Apit.

1.2.4. Kewenangan

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor

sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud: membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan Badan Pemerintah yang lain, dll.

Kewenangan akan menciptakan koordinasi dalam suatu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hal ini berfungsi untuk mengintegrasikan, menyatukan semua kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar. Dengan adanya koordinasi maka setiap bagian/unit kerja dalam melakukan pekerjaannya tidak akan terjadi kesamaan/duplikasi pekerjaan dengan bagian/unit kerja lainnya.

Pembinaan melalui kelompok KUBE, maka diharapkan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan KUBE. Diharapkan dengan KUBE, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok

1.2.5. Fasilitas

Pada dasarnya fasilitas sangat penting sebagai salah satu upaya menghimpun, mengatur, memelihara, dan mengendalikan alat, benda, uang, waktu dan metode kerja serta peralatan apapun yang diperlukan

untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam usaha kerjasama itu. Fasilitas memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tujuan utama untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dengan cara memperkuat kelembagaan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Sungai Apit.

1.3. Faktor Disposisi

Pelaksanaan program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit.

1.3.1. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Pelaksanaan program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari semua pihak termasuk pelaksana program itu sendiri, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan program masalah fakir miskin. Sikap pelaksana yang mendukung program akan menumbuhkan kreativitas dari para pelaksana itu sendiri, sehingga pelaksanaan program akan efektif. Diterapkannya program masalah fakir miskin memperoleh tanggapan-tanggapan positif dari para pelaksananya.

Jumlah Anggota PMKS di Kecamatan Sungai Apit 2011-2012

Kode	Golongan Tarif	Pelanggan
1.	Kelompok Ternak Ikan	12
2.	Kelompok Jahit	14
Jumlah		20

Sumber data: Laporan TKSK Kecamatan Sungai Apit Tahun 2012

Pelaksanaan program ini tidak berjalan baik karena tidak secara maksimal di dukung oleh berbagai pihak dan masih terdapat banyak kekurangan diantaranya keterbatasan dan yang dianggap sebagai masalah yang sangat urgen. Pelatihan keterampilan yang dilakukan secara tidak rutin membuat kemampuan mereka dalam mengembangkan program ini kurang terampil dan memahami proses pengembangan hasil usaha mereka.

Pelatihan/Bintek/pendampingan Pelaku usaha KUBE perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui kegiatan pelatihan/bimbingan teknis yang meliputi beberapa aspek penting misalnya aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan keuangan serta keterampilan teknis produksi dan pengendalian kualitas. Kegiatan monitoring dan evaluasi hendaknya dilakukan secara periodik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian program kegiatan bagi *stakeholders* yang terlibat.

1.3.2. Inisiatif

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Selain itu dukungan positif yang dapat dilakukan adalah dimana antar kelompok KUBE melakukan suatu kerjasama membangun inisiatif dalam menjalankan usaha yang diberikan.

Ternak ikan yang mengalami kerugian atau kegagalan yang dapat dikatakan mencapai 60% yang diakibatkan kurangnya insentif bagi masyarakat sebagai unsur pelaksana. Dalam kemitraan ini, TKSK Kecamatan Siak saja yang mana mereka mencari inisiatif mitra sendiri dan kamipun hanya bisa memantau dari hasil laporan-laporan TKSK Sungai Apit tersebut. Salah satu wujud dari dukungan pemerintah yang perlu dilakukan adalah dengan secara konsisten mengikutsertakan produk-produk KUBE pada pameran

baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Diperlukan fasilitasi pemerintah dalam bentuk penyediaan pusat informasi pasar di sentra-sentra KUBE. Selama ini para pelaku usaha tidak mempunyai akses dan informasi yang sama terhadap informasi pasar (*assymetric information*) misalnya informasi harga produk, dan permintaan pasar.

1.4. Faktor Struktur Birokrasi

1.4.1. Standart Operation Procedur (SOP)

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan ini. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap Birokrasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Seleksi pembentukan pra kelompok dan kelompok, pemilihan/penentuan jenis usaha, pelatihan keterampilan anggota KUBE, bantuan permodalan, dan evaluasi. Seleksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kabupaten Siak melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sungai Apit dilakukan melalui mendatangi setiap rumah keluarga miskin yang terdata sebagai fakir miskin dan menanyakan secara langsung apakah

mereka mau ikut kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sedang dijalankan tersebut hal ini telah sesuai dengan SOP yang berlaku saat ini.

4.1.2. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Untuk penentuan jenis usaha ditentukan oleh ketua kelompok atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompoknya serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan tersebut dengan mengajukan proposal kepada dinas yang bersangkutan yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kabupaten Siak. Jenis usaha yang sering dikembangkan yaitu seperti ternak ikan, menjahit, ternak sapi, pembuatan kerupuk dll.

Akan tetapi biasanya hanya di utuskan satu (1) orang untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kabupaten Siak karena keterbatasan dana yang dimiliki. Kemudian 1 orang utusan tadi akan menjelaskan apa-apa yang didapat pada saat bimbingan atau pelatihan tersebut dan setelah itu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kabupaten Siak melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sungai Apit akan melakukan evaluasi terhadap Kelompok Usaha Bersam (KUBE) yang dujalankan oleh fakir miskin tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit tahun 2011, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi program masalah fakir miskin belum berjalan efektif. Hal faktor yang paling dominan untuk mempengaruhi Implementasi Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit adalah faktor sumberdaya.

Sumberdaya adalah faktor paling penting dalam implementasi Program penyanggah masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan Sungai Apit tahun 2011. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya sumberdaya yang berkualitas, program itu tidak akan berjalan efektif dan efisien. PMKS akan berjalan efektif dan efisien apabila didukung oleh Staff yang berkualitas dan memiliki skill yang mumpuni, informasi yang berjalan secara baik antara pihak yang terkait dapat menciptakan manajemen yang juga baik, dan kewenangan dari lembaga pelaksana akan dapat membantu terlaksananya Implementasi Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit Tahun 2011, serta fasilitas yang cukup akan dapat menunjang Program PMKS di Kecamatan Sungai Apit.

SARAN

1. Diharapkan dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten siak selalu melaksanakan pengawasan dan evaluasi program serta peninjauan lapangan secara rutin.
2. Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan program penyandang masalah kesejahteraan ini secara komprehensif.
3. Diharapkan Dinas Sosial dan tenaga kerja kabupaten siak membantu memperbanyak mitra kerja demi terlaksananya program Penyandang masalah kesejahteraan Sosial.
4. Kualitas tenaga kerja lebih di tingkatkan lagi karena dengan kualitas tenaga kerja yang berkualitas mudah-mudahan dapat menciptakan lapangan kerja yang dengan sendirinya menjadikan lapangan kerja makin luas dan bertambah cadangan tenaga kerjapun berkualitas, sehingga seimbang dan dapat memperbaiki pengelolaan SDM kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James. (1960). *Public Policy Making, dikutip oleh Budi Winarno*. (2007). *Kebijakan Publik dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghafar, Affan. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Meleong, Lexi. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirwo, Daeng. (1991). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung : Angkasa.
- Sujamto. (2003). *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sukanto. (2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta: Balairung dan Co.

Widiyanti, Ninik dan
Y.W.Sunindhia. (1987).
*Kepala Daerah dan
Pengawasan dari Pusat.*
Jakarta: Bina Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial.